

PENGUNGKAPAN INFORMASI AKUNTANSI OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI INTERNET

Marshella Windy Agnesia

E-mail: marshella_wa@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to examine factors that affect the financial statement disclosure in internet by local governments. The population of this research are local governments on Java. The number of samples is 108, calculated using purposive sampling. Analysis method in this research used logistic regression analysis to examine all the hypotheses. The independent variables that affected the financial statement disclosure in internet by local governments were divided into six variables: local wealth, local government investment, local government size, leverage, press visibility, and political competition. The results of the study showed that there were three variables gave a positive and significant effect on the financial statement disclosure of local governments over the internet; they were local wealth, local government size, and press visibility. Meanwhile, the other variables gave a positive effect, but they were not significant.

Keywords: financial statement disclosure, internet

JEL Classification: G34, H83, M42

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet yang berkembang dengan pesat menjadikan komunikasi melalui internet sebagai alat penting penyaluran dan penyebaran

informasi, ditandai dengan besarnya jumlah pengguna, melintasi batas ruang dan waktu, *real-time*, murah, dan sifat interaksinya yang sangat tinggi (Ashbaugh *et al.*, 1999; Debreceny *et al.*, 2002). Berbagai keunggulan tersebut masih ditambah dengan integrasi teks, angka, gambar, gambar hidup, dan suara sehingga penyaluran informasi melalui media internet semakin interaktif (Debreceny *et al.*, 2002).

Penggunaan internet sebagai salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bidang administrasi publik, atau diistilahkan sebagai *e-Government*, diyakini dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, interaksi, dan akuntabilitas publik. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk nyata dari adanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 3, bahwa informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan pelaporan keuangan berbasis internet oleh pemerintah daerah merupakan perkembangan dari praktik akuntansi pengungkapan yang ada meskipun perkembangan praktik ini tidak didasari oleh standarisasi pengungkapan informasi keuangan di internet. Informasi yang diberikan melalui media *website* merupakan pengungkapan yang sifatnya sukarela dan tidak diregulasi oleh perundang-undangan atau badan tertentu, khususnya di negara berkembang seperti juga di Indonesia (Almilia, 2008). Melalui *website* pemerintah daerah, informasi tersebut akan tersampaikan

dengan tepat waktu. Semakin cepat waktu peyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009).

Penelitian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi pemerintah daerah melalui internet telah banyak dilakukan, namun umumnya penelitian-penelitian tersebut belum menemukan hasil yang koheren. Penelitian-penelitian tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Cinca *et al.* (2008); Laswad *et al.* (2005); Garcia dan Garcia (2010); Martani dan Lestari (2012); Afransyah dan Haryanto (2013). Kontroversi-kontroversi hasil penelitian-penelitian tersebut secara keilmuan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji ulang. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan kajian atau penelitian ulang atas pengaruh kekayaan pemerintah daerah, investasi pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, keterbukaan pers, dan persaingan politik pada pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui internet.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Kekayaan pemerintah menggambarkan kinerja yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya (Laswad *et al.*, 2005). Ketika kinerjanya baik, maka tidak menjadi masalah bagi pemerintah untuk melaporkan informasi keuangannya. Namun demikian Laswad *et al.*, (2005) menerangkan bahwa, pemerintahan daerah dengan kekayaan yang lebih kecil akan cenderung membatasi akses informasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun hipotesis penelitian:
H1: Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, investasi pemerintah daerah atau belanja modal digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas layanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja, pemerintah daerah seharusnya memberikan layanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Merujuk kepada hal ini, seharusnya semakin tinggi tingkat layanan yang diberikan, semakin tinggi

keinginan pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangannya di internet. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun hipotesis penelitian:

H2: Investasi pemerintah daerah berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

Ukuran perusahaan adalah faktor penentu penting dalam pengungkapan perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dan tingkat pengungkapan (Meek *et al.*, 1995; Zarzeski, 1996). Mora (1994). Penelitian tersebut memberikan bukti bahwa tingkat pengungkapan berhubungan positif dengan ukuran perusahaan. Dalam hal ini, diasumsikan ukuran perusahaan dan ukuran pemerintah daerah adalah sama. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun hipotesis penelitian:

H3: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

Leverage merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin dana yang dipinjam menggunakan jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jumlah utang yang dimaksud di sini mencakup jumlah dari utang jangka panjang dan jangka pendek. Berdasarkan teori keagenan, semakin tinggi tingkat *leverage*, perusahaan memiliki insentif untuk meningkatkan pengungkapan sukarela kepada *stakeholder* baik berupa media pengungkapan tradisional maupun media lain yaitu pengungkapan informasi perusahaan melalui *website* perusahaan. Terdapat hasil penelitian yang beragam yang menjelaskan hubungan antara tingkat *leverage* perusahaan dengan tingkat pengungkapan sukarela. Ismail (2002) memberikan bukti adanya hubungan positif antara *internet financial reporting* dan tingkat *leverage* perusahaan dalam struktur modal perusahaan, sementara penelitian yang dilakukan oleh Zeghal *et al.* (2007) dan Oyelere (2003) tidak mendukung adanya asosiasi antara tingkat *leverage* dan pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun hipotesis penelitian:

H4: *Leverage* berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

Media memainkan peran sebagai moderator dalam hubungan keagenan antara pemilih dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki tekanan

dari media lebih besar akan mengeksplorasi penggunaan beberapa saluran untuk pelaporan, termasuk internet, untuk menyebarkan informasi keuangan yang dijabarkan oleh orang-orang mereka sendiri (Laswad *et al.*, 2005). Namun, media tidak selalu bertindak atas nama warga negara, melainkan memiliki tujuan keuangan sendiri. Untuk itu, media biasanya lebih memilih untuk menerbitkan berita yang menyajikan skandal dan korupsi untuk meningkatkan popularitas mereka. Masyarakat dewasa ini lebih cerdas ketika mengetahui suatu berita mengenai pemerintahan dari media, justru melakukan semacam *cross-check* di *website* resmi pemerintahan daerah. Afransyah dan Haryanto (2013) serta Laswad *et al.* (2005) justru memberikan bukti bahwa keterbukaan pers berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan sukarela pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun hipotesis penelitian:

H5: Keterbukaan pers berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah melalui internet.

Kompetisi politik yang tinggi dalam suatu pemerintah daerah akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar dari para saingan politik dan masyarakat. Pesaing politik akan berusaha untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah dan mencari kelemahannya. Pemerintah daerah yang berkompetisi politik tinggi menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dengan memberikan informasi lebih lanjut yang menunjukkan pemenuhan janji sebelum pemilu (Baber dalam Laswad *et al.*, 2005). Informasi keuangan yang baik akan membawa penilaian yang baik oleh masyarakat dan diharapkan pejabat daerah terpilih dapat memiliki peluang untuk dipilih kembali pada pemilihan periode berikutnya. Penelitian Garcia dan Garcia (2010) menunjukkan bahwa semakin tinggi persaingan politik dalam pemerintah daerah, maka akan mendorong pemerintah daerah tersebut untuk melaporkan informasinya di internet. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun hipotesis penelitian:

H6: Kompetisi politik berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui Internet.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah yang ada di Pulau Jawa, di tingkat kabupaten dan kota. Jumlah pemerintah daerah di Pulau Jawa

sebanyak 34 pemerintahan kota dan 85 pemerintahan kabupaten. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki laporan keuangan yang lengkap selama tahun 2013 dan yang memiliki *website* resmi. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di internet; sedangkan variabel independennya adalah Kekayaan Pemerintah Daerah, Investasi Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Keterbukaan pers, dan Kompetisi Politik.

Variabel kekayaan pemerintah daerah dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pemerintah daerah. Variabel investasi pemerintah daerah diukur dari nilai investasi pada laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel ukuran pemerintah daerah dilihat dari aset yang dimiliki pemerintah daerah. Variabel *leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio*. Variabel keterbukaan pers diukur dengan menggunakan skor *pagerank website* resmi pemerintah daerah. Kompetisi politik ini dapat diukur dengan menggunakan Indeks Herfindahl-Hirschmann yang dikembangkan oleh Herfindahl dan Hirschmann (1982) dengan rumus sebagai berikut :

$$HHI = \sum_{i=1}^N s_i^2$$

$$HHI = P1^2 + P2^2 + P3^2 + \dots + PN^2$$

Keterangan: *Si* adalah persentase perolehan suara suatu calon kepala daerah pada pemilihan umum dan *N* adalah jumlah calon kepala daerah. Setelah indeks HHI diperoleh, maka hasilnya akan dibagi secara inverse sebagaimana pengukuran yang dikembangkan oleh Garcia (2010) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Inverse Kompetisi Politik} = \frac{1}{\text{Indeks HHI}}$$

Hal ini dilakukan dengan anggapan bahwa masing-masing kandidat memiliki peluang yang sama

untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, semakin tinggi nilai inverse indeks HHI, maka semakin kompetitif situasi politik yang terjadi di suatu daerah tanpa adanya pihak yang dominan. Analisis data inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik (*logistic regression*). Alasan penggunaan analisis regresi logistik ini karena variabel dependennya merupakan variabel *dummy*, yang bernilai 1 dan 0. Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen (Ghozali, 2007).

Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Ghozali, 2007):

$$\ln \left(\frac{p}{1-p} \right) = b_0 + b_1KDA + b_2IVD + b_3UPD + b_4LEV + b_5PRS + b_6PLT + \epsilon$$

Keterangan:

- P = Probabilitas Pengungkapan Laporan Keuangan Melalui Internet
- KDA = Kekayaan pemerintah daerah
- IVD = Investasi pemerintah daerah
- UPD = Ukuran pemerintah daerah
- LEV = *Leverage*
- PRS = Keterbukaan pers
- PLT = Kompetisi Politik

HASIL PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Pulau Jawa sebanyak 85 Kabupaten dan 34 Kota (119 entitas). Berdasar jumlah populasi tersebut, dipilih sampel penelitian berdasarkan metode purposive sampling dengan kriteria yang sudah ditentukan. Berdasar seluruh pemerintah daerah yang ada di Pulau Jawa baik di tingkat kabupaten maupun kota terdapat 1 kabupaten dan kota yang tidak memiliki data persaingan politik. Berdasar kriteria tersebut, diperoleh sampel akhir sebanyak 108 Pemerintah Daerah. Berdasar total 108 entitas sampel, sebanyak 29 pemerintah daerah melakukan pengungkapan laporan melalui website resminya, sedangkan sisanya sebanyak 79 pemerintah daerah tidak melakukan pengungkapan LKPD melalui website resmi.

Berdasarkan Tabel 1 didapatkan informasi bahwa variabel kekayaan pemerintah daerah (KDA) memiliki nilai minimum Rp 59.545.000.000; nilai maksimum Rp 2.791.580.000.000; nilai rata-rata/*mean* sebesar Rp 277.692.920.000 dan standar deviasi sebesar Rp 365.239.190.000. Variabel investasi pemerintah daerah (IVD) memiliki nilai minimum Rp 67.646.000.000; nilai maksimum Rp 1.316.782.000.000; nilai rata-rata/*mean* sebe-

Tabel 1
Statistik Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
KDA	108	59.545,00	2.791.580,00	277.692,94	365.239,19
IVD	108	67.646,00	1.316.782,00	312.024,65	247.335,59
UPD	108	121.467,00	35.358.824,00	3.949.274,39	4.047.106,30
LEV	108	0,00	0,03	0,01	0,01
PRS	108	884,00	83.776,00	22.848,04	18.670,90
PLT	108	1,13	7,46	2,83	0,89

Dimana KDA adalah kekayaan pemerintah daerah yang diukur dari nilai PAD (dalam jutaan rupiah), IVD adalah investasi pemerintah daerah yang diukur dari besarnya investasi/belanja daerah (dalam jutaan rupiah), UPD adalah ukuran pemerintah daerah yang diukur berdasarkan besar aset yang dimiliki (dalam jutaan rupiah), LEV adalah *leverage* yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio*, PRS adalah keterbukaan pers yang diukur berdasarkan skor *pagerank website* resmi pemerintah daerah, dan PLT adalah kompetisi politik yang diukur dari nilai inverse perolehan suara di pilkada.

sar Rp 312.024.650.000 dan standar deviasi Rp 247.335.590.000. Variabel ukuran pemerintah daerah (UPD) memiliki nilai minimum Rp 121.467.000.000; nilai maksimum Rp 35.358.824.000.000; nilai rata-rata/mean sebesar Rp 3.949.274.390.000 dan standar deviasi Rp 4.047.106.300.000.

Variabel *leverage* (LEV) memiliki nilai minimum 0,00; nilai maksimum 0,03; nilai rata-rata/mean sebesar 0,01 dan standar deviasi 0,01. Variabel keterbukaan pers (PRS) memiliki nilai minimum 884,00; nilai maksimum 83.776,00; nilai rata-rata/mean sebesar 22.848,04 dan standar deviasi 18.670,90. Variabel kompetisi politik (PLT) memiliki nilai minimum 1,13; nilai maksimum 7,46; nilai rata-rata/mean sebesar 2,83 dan standar deviasi 0,89.

Pengujian multivariat dilakukan dengan menggunakan *binary logistic regression* atau regresi logistik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen seperti kekayaan pemerintah daerah, investasi pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, keterbukaan pers, dan kompetisi politik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan LKPD melalui *website* resmi.

Uji nilai *Likelihood* digunakan untuk membuktikan apakah dengan penambahan variabel bebas ke dalam model regresi dapat memperbaiki model regresi dalam memprediksi variabel dependen penelitian. Uji ini didasarkan pada nilai -2LogL baik pada *block* 0 maupun *block* 1. *Block* 0 adalah model yang hanya memasukkan konstanta saja, sedangkan *block* 1 adalah model yang memasukkan konstanta dan variabel bebas (variabel terikat). Hasil pengujian ini menunjukkan penurunan nilai -2Log Likelihood sebesar 111,644 (*Block* 0 \rightarrow 125,664 – *Block* 1 \rightarrow 14,020). Penurunan nilai -2Log Likelihood tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan model regresi logistik dalam penelitian ini adalah baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa penambahan variabel independen berupa kekayaan pemerintah daerah, investasi pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, keterbukaan pers, dan kompetisi politik dapat memperbaiki model fit dalam model *binary logistic regression* penelitian ini.

Uji nilai Hosmer dan Lemeshow's *Goodness of Fit Test* digunakan untuk membuktikan bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model regresi dalam penelitian atau tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model penelitian dapat dikatakan fit.

Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's goodness of Fit test* lebih kecil atau sama dengan tingkat signifikansi penelitian 5%, maka terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodness fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi observasinya. Sebaliknya, jika nilai *Hosmer and Lemeshow's goodness of Fit test* lebih besar dari 5%, maka model mampu memprediksi nilai observasi atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena cocok dengan data observasi penelitian. Hasil pengujian nilai *Hosmer and Lemeshow's goodness of Fit test* dalam penelitian ini menunjukkan angka sebesar 1,229 dengan nilai probabilitas atau signifikansi sebesar $0,996 > 0,05$. Hasil ini mengindikasikan bahwa model penelitian ini adalah fit dan dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi observasi dalam penelitian.

Uji nilai Nagelkerke R^2 mirip dengan nilai koefisien determinasi (R^2) dalam pengujian dengan model regresi berganda yang menjelaskan seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian nilai Nagelkerke R^2 dalam penelitian ini adalah sebesar 0,937 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen dalam hal ini adalah pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui internet dapat dijelaskan oleh variabel independen kekayaan pemerintah daerah, investasi pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, keterbukaan pers, dan kompetisi politik sebesar 93,7%. Sementara itu, variabilitas sisanya sebesar 6,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji parameter *logistic regression* digunakan setelah kelayakan model diuji dan diperoleh hasil bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan sebagai model prediksi variabel pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Uji ini adalah uji estimasi parameter atau koefisien dalam model regresi penelitian. Dengan mengetahui parameter atau koefisien regresi dalam pengujian regresi ini, maka dapat diketahui nilai dan arah pengaruh masing-masing variabel serta tingkat signifikansi prediksi terhadap kondisi pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Selain itu, dengan pengujian ini dapat diketahui nilai probabilitas untuk masing-masing variabel independen sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan simpulan didukung atau tidak didukung hipotesis yang diajukan

dalam penelitian.

Variabel kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan kompetisi politik mempunyai nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) penelitian yaitu 5%. Nilai probabilitas untuk variabel kekayaan pemerintah daerah 0,026; ukuran pemerintah daerah 0,048; dan kompetisi politik 0,008. Nilai probabilitas untuk ketiga variabel tersebut di bawah level signifikansi penelitian 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan kompetisi politik berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Variabel investasi, *leverage*, dan keterbukaan pers mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel investasi 0,574; *leverage* 0,235; dan keterbukaan pers 0,051 bukan variabel-variabel yang mempengaruhi probabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013 di internet pada tahun 2014 di Indonesia.

Estimasi parameter β yang digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu meningkatkan log probabilitas suatu *event* terjadi. Oleh karena tanda $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ dan β_6 positif, maka semakin besar kekayaan pemerintah daerah, investasi pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, keterbukaan pers, dan kompetisi politik semakin

besar juga peluang untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Hasil menunjukkan bahwa H1, H3 dan H6 signifikan sehingga hipotesis tersebut dapat diterima. Sedangkan H2, H4 dan H5 tidak signifikan sehingga hipotesis tersebut ditolak. Hasil pengujian tersebut ditunjukkan dalam Tabel 2.

Hasil pengujian *binary logistic regression* juga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan model penelitian. Model *binary logistic regression* dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini:

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah diterima karena terbukti positif mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Kekayaan pemerintah daerah merupakan bukti nyata atas kinerja pemerintah daerah yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin besar Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah maka kecenderungan pemerintah daerah untuk melaporkan keuangannya di internet pun juga semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.

Jika diteliti lebih lanjut dari hasil analisis statistik deskriptif diperoleh data bahwa untuk variabel kekayaan pemerintah daerah, kekayaan suatu daerah di Pulau Jawa rata-rata sebesar Rp 277.692.000.000,-. Nilai kekayaan rata-rata yang dimiliki pemerintah

Tabel 2
Uji Parameter Logistic Regression

Variabel	β	Wald	Signifikansi
KDA	0,000	4,955	0,026
IVD	0,000	0,317	0,573
UPD	0,000	3,893	0,048
LEV	158,504	1,408	0,235
PRS	0,000	3,819	0,051
PLT	9,119	6,965	0,008

Dimana KDA adalah kekayaan pemerintah daerah yang diukur dari nilai PAD (dalam jutaan rupiah), IVD adalah investasi pemerintah daerah yang diukur dari besarnya investasi/belanja daerah (dalam jutaan rupiah), UPD adalah ukuran pemerintah daerah yang diukur berdasarkan besar aset yang dimiliki (dalam jutaan rupiah), LEV adalah *leverage* yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio*, PRS adalah keterbukaan pers yang diukur berdasarkan skor *pagerank website* resmi pemerintah daerah, dan PLT adalah kompetisi politik yang diukur dari nilai inverse perolehan suara di pilkada.

daerah yang cukup besar ini, seperti menyebabkan tingginya keingintahuan dari masyarakat atas kinerja pemerintah daerahnya dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki. Sebagai akibatnya, pemerintah daerah yang bersangkutan menganggap bahwa pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah penting untuk dilakukan.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel tingkat investasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Dilihat dari nilai rata-rata tingkat investasi yang dilakukan oleh suatu pemerintah daerah yang hanya Rp 312.024.650.000, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebanyakan pemerintah daerah tidak cukup termotivasi untuk mengungkapkannya kepada masyarakat karena mempunyai anggapan bahwa angka rata-rata Rp 312.024.650.000 ini masih terlalu kecil yang jika hal ini diungkapkan, kemungkinan tidak akan menimbulkan rasa keingintahuan di tengah masyarakat.

Hal ini tidak sesuai dengan teori agensi dimana seharusnya agent me-ungkapkan informasi akuntansinya termasuk yang berhubungan dengan keputusan investasi karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan principal walaupun nilainya tidak besar. Sudah merupakan suatu kewajiban bahwa agent harus memberitahukan semua informasi dan kondisi yang ada pada suatu organisasi kepada principal untuk menghindari terjadinya asimetri informasi. Salah satu cara yang biayanya rendah adalah melalui internet.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pelaporan informasi keuangan di internet mempertimbangkan kemampuan daerah baik kota maupun kabupaten dalam mengakses internet. Pemerintah daerah dengan aset yang besar pada umumnya memiliki sarana dan prasarana internet yang baik sehingga kemampuan daerah dalam mengakses internet juga baik, maka ukuran pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Sementara itu faktor lain yang mendukung pelaporan di internet adalah kualitas sumber daya manusia, jumlah aset yang besar jika disertai dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan menjamin bahwa

pemerintah daerah tersebut memanfaatkan teknologi informasi (internet) dalam pelaporan akuntabilitas dan transparansi informasi keuangan.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan hasil bahwa variabel *leverage* memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi melalui internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Jika diteliti lebih lanjut dari hasil analisis statistik deskriptif diperoleh data bahwa untuk variabel *leverage* suatu daerah di Pulau Jawa rata-rata hampir 0,00. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang dapat menutupi setiap dana yang dipinjam dengan aset yang dimiliki, sehingga membuat pemerintah daerah tidak keberatan untuk mengungkapkan laporan keuangannya melalui internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan kredit yang rendah memiliki pengungkapan sukarela yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang terkait termasuk kreditur. Besar kecilnya likuiditas pemerintah daerah memengaruhi kepercayaan pemegang saham maupun masyarakat atas kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengungkapkan informasi tersebut.

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel keterbukaan pers justru memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah justru enggan mengungkapkan informasi akuntansinya di internet dikarenakan adanya media yang memberitakan hal-hal negatif tentang pemerintah daerah yang bersangkutan. Fenomena ini seakan-akan membenarkan berita-berita negatif tersebut dan menimbulkan kesan bahwa berita negatif tersebut benar adanya.

Jika banyak hal negatif yang diketahui oleh masyarakat, tentunya masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pejabat yang sedang berkuasa. Hal ini dapat berakibat terhadap elektabilitas pejabat tersebut pada pemilihan kepala daerah di periode berikutnya. Seharusnya hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi suatu pemerintah daerah untuk meng-*counter* media dengan mengungkapkan informasi akuntansinya di internet untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang sisi positif dari pemerintah daerah. Namun,

sepertinya hal ini tidak terjadi di Pulau Jawa.

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa kompetisi politik terbukti mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Semakin tinggi persaingan politik dalam pemerintah daerah, akan mendorong pemerintah daerah tersebut melaporkan informasi keuangannya di internet. Selain murah dan dapat diakses dengan mudah, pelaporan di internet juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintahan daerah yang menjabat sekarang dengan ekspektasi terpilihnya kembali dalam pemilu mendatang. Kompetisi politik dapat menjadi faktor yang menentukan dalam memotivasi pejabat yang sedang berkuasa dan berperan sebagai agen untuk mengungkapkan informasi akuntansinya (salah satunya melalui internet) sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai principal agar posisinya tetap dipertahankan dan tidak digantikan oleh kompetitor politiknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi/mendorong pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui internet. Faktor-faktor tersebut yaitu kekayaan pemerintah daerah, investasi pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, keterbukaan pers, dan kompetisi politik. Berdasar enam variabel faktor yang diuji, hasil penelitian ini menunjukkan ada tiga variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet yaitu kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan kompetisi politik. Sedangkan untuk variabel investasi pemerintah daerah, *leverage* dan keterbukaan pers terbukti berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

Saran

Beberapa keterbatasan atau hal yang tidak bisa dilakukan di dalam penelitian ini adalah 1) proksi pengukuran *pagerank* yang menggunakan *website* www.alexacom

tidak memberikan rangking per periode waktu tetapi rangking secara keseluruhan waktu. Hal ini menyebabkan periode waktu yang digunakan selama satu tahun dianggap masih terlalu singkat, 2) penelitian ini hanya bisa dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. Ketidakmampuan penelitian ini menggunakan metode analisis yang lain dikarenakan sifat variabel-variabelnya dan distribusi datanya. Berdasar data yang diperoleh variabel dependen bersifat kategorikal, variabel independen bersifat kontinyus maupun kategorikal, dan distribusi datanya tidak semuanya normal. Berdasar simpulan dan keterbatasan, maka disampaikan saran-saran untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan proksi pengukuran baru yang memberikan data dengan menggunakan periode waktu sebagai batasan sehingga dapat menambah periode waktu penelitian lebih dari satu tahun agar diperoleh hasil yang lebih akurat dan menggunakan variabel independen lain yang bisa membuat distribusi datanya normal, agar pengujian dapat dilakukan menggunakan dua metode analisis sekaligus dan hasil pengujiaannya dapat dibandingkan, misalnya metode analisis regresi logistik dan metode analisis deskriminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, D. A., Kumar, V., and Day, G. S. 2004. *Marketing Research*. Eight Edition, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Afryansyah, R.D. & Haryanto. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah". *Jurnal of Accounting*, 2(3): 1-11.
- Alanezi, F.S. 2009. "Factors Influencing Kuwaiti Companies' Internet Financial". *Journal of Economic & Administrative Sciences*, 25 (2): 44-78.
- Almilia, L.S. 2009. "Analisa Kualitas Isi Financial and Sustainability Reporting pada Website Perusahaan Go Publik di Indonesia". *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI 2009)*, ISSN: 1907-5022, 34-38.

- Almilia, L.S. 2009. "Determining Factors Of Internet Financial Reporting In Indonesia". *Accounting & Taxation*, 1 (1): 87-99.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashbaugh, D.R. 1999. *Quantitative-Qualitative Friction Ridge Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Ridgeology*. CRC Press.
- Azwar, S. 2007. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Belkaoui dan Ahmed Riahi, 2006, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Cinca and Serrano, C. 2008. *Factors Influencing E-disclosure in Local Public Administrations*. Spanyol.
- Debreceny, R., Gray, G.L. & Rahman, A. 2002. "The determinants of Internet financial reporting". *Journal of Accounting and Public Policy*, 21 (4-5): 371-394.
- Ettredge, M., Richardson, V.J., Scholz, S. 2002. "Dissemination of information for investors at corporate websites". *Journal of Accounting and Public Policy*, 21 (4-5): 357-369.
- Garcia, Ana Carcaba. 2010. "Determinant of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities". *Local Government Studies*, 36 (5): 679- 695.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Gudono. 2014. *Analisis Data Multivariat*. Yogyakarta: BPFE.
- Hanafi, M. Dan A. Halim. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: YKPN.
- Hilmi, A.Z. dan D. Martani. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi". Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV. Banjarmasin. 20-23 September.
- Ismail, Tariq H. 2002. "An Empirical Investigation of Factors Influencing Voluntary Disclosure of Financial Information on the Internet in the GCG countries". Available at <http://www.ssrn.com>.
- Laswad, F., Richard F., dan Peter O. 2005. "Determinants Of Voluntary Internet Financial Reporting By Local Government Authorities". *Journal of Accounting and Public Policy*, 24: 101-121.
- Lestari, H.S. dan A. Chariri. 2007. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) Dalam Website Perusahaan". *Working Paper* FE UNDIP.
- Lukito, Y.P. & Susanto, Y.K. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Internet Financial and Sustainability Reporting". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 17 (1): 61-70.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Martani, D. & A. Lestari. 2010. "Local Government Financial Statement Disclosure In Indonesia". Annual Meeting and Conference Asian Academic Accounting Association (AAAA). Thailand. 28 November-1 Desember.
- Meek, G. K., Roberts, C.B. dan Gray, S.J. 1995. "Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosure bu U.S, U.K and Continental European Multinational Corporations". *Journal of Inter-*

- national Business Studies*, 26 (3): 555 – 572.
- Munther Talal Momany, M.T., and Pillai, R. 2013. “Internet Financial Reporting in UAE- Analysis and Implications”. *Global Review of Accounting and Finance*, 4 (2): 142-160.
- Musso, J., Weare, C. and Hale, M. 2000. “Designing web technologies for local governance reform: good management or good democracy?”. *Political Communication*, 17 (1): 1-19.
- OECD. 2003. *OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003*. Paris: OECD Publishing.
- Oyelere, Peter, Fawzi Laswad dan Richard Fisher. 2003. “Determinants of Internet Financial Reporting by New Zealand Companies”. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 14 (1): 26-63.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000. Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 56 Tahun 2005. Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Pollitt, C. 1990. *Managerialism and The Public Services*. Cambridge: Basil Blackwell.
- PSAK No. 1. Tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Sekaran, U. 2003. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Fourth Edition, John Wiley & Sons, New York.
- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) No. 1. Tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Sukhemi. 2010. “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah”. *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 5: 85-100.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPFE UGM Yogyakarta.
- Torres, L., Pina, V. and Acerete, B. 2006. “E-governance developments in European Union cities: reshaping government’s relationship with citizens”. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 19 (2): 277-302.
- Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wallace, R. S. Olusegun, Kamal Naser dan Araceli Mora. 1997. “The Relationship Between the Comprehensive of Corporate Annual Reports and Firms Characteristic in Spain”. *Accounting and Business Research*, 25 (97): 41 – 53.
- Welch, E.C., Hinnant, C.C. and Moon, M.J. 2005. “Linking Citizen Satisfaction With E-government and Trust in Government”. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15 (3): 371-391.
- Wolk, H., M. G. Tearney and J. L. Dodd. 2000. *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach*. South Western College Publishing.
- Zarzeski, M. T. 1996. “Spontaneous Harmonization Effect of Culture and Market Forces on Accounting Disclosure Practices”. *Accounting Horizon*, 10 (1): 18 – 37.
- Zeghal, D., R. Mouelhi dan H. Louati. 2007. “An Analysis of the Determinants of Research and Development Voluntary Disclosure by Canadian Firms”. *The Irish Accounting Review*, 14 (2): 61 - 89.